

SIARAN PERS

Badan Pemeriksa Keuangan



Untuk segera diterbitkan

Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI

Kalan BPK Provinsi Jateng: “Penyelesaian Tindak Lanjut Mendorong Perbaikan Opini”

Semarang, Jateng

Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) BPK menjadi bukti komitmen pemerintah daerah (Pemda) mewujudkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Penyelesaian TLRHP akan mendorong perbaikan opini atas laporan keuangan.

Demikian antara lain disampaikan Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Jateng Hery Subowo saat menerima kunjungan kerja Komite IV DPD RI ke BPK Perwakilan Provinsi Jateng pada Selasa (27/11). Kunjungan kerja Komite IV DPD RI tersebut dilakukan dalam rangka Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester I BPK Tahun 2018.

Tiba di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jateng sekira pukul 09.30 WIB, rombongan Komite IV DPD RI dipimpin oleh Ajiep Padindang (Provinsi Sulawesi Selatan/Ketua Komite IV). Adapun anggota Komite IV DPD RI yang turut dalam rombongan tersebut adalah: Bambang Sadono (Jateng), A. Aziz Adyas (Lampung), Rugas Binti (Kalteng), Adrianus Garu (NTT), Dewi Sartika Hemeto (Gorontalo), dan Mervin Sadipun Komber (Papua Barat). Selain para anggota Komite IV DPD RI, turut dalam rombongan tersebut Staf Ahli Komite IV DPD, Abdul Kodir dan Lies Zulfiati.

Digelar di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jateng, acara tersebut dihadiri para Inspektur dan Kepala OPD pengelola Keuangan dan Aset daerah dari delapan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Jateng. Kedelapan pemerintah kabupaten/kota tersebut adalah: Kota Semarang, Kota Tegal, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Magelang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Rembang.

Dalam acara tersebut, Kalan BPK Jateng Hery Subowo mengatakan, sampai dengan Semester I Tahun 2018, berdasarkan keseluruhan pemeriksaan yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Jateng terdapat 11.036 jumlah temuan pemeriksaan dengan 25.060 rekomendasi. Dari total rekomendasi yang ada, sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 21.084 (84,13%), sudah ditindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi atau belum ditindaklanjuti sama sekali sebanyak 3.966 (15,82%), dan tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 10 rekomendasi (0,03%).

Lebih lanjut Kalan BPK Jateng Hery Subowo menjelaskan bahwa saat ini penyelesaian TLRHP oleh pemerintah telah ditetapkan menggunakan mekanisme berbasis *on line* dengan pemanfaatan Sistem Informasi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK (SIPTLR-LHP BPK). Dengan sistem ini, pejabat Pemda dapat mengunggah langsung dokumen ataupun bukti TLRHP dari kantor Pemda, dan BPK memantau tindak lanjut tersebut dari kantor BPK. “Sistem ini sangat membantu Pejabat Pemda untuk memenuhi kewajiban penyelesaian TLRHP yang berdasarkan aturan ditetapkan dalam waktu 60 hari setelah LHP diserahkan,” katanya.

Menurut Ketua Komite IV Ajiep Padindang, kunjungan kerja ke BPK Perwakilan Provinsi Jateng dilakukan untuk mendapatkan informasi, tanggapan dan penjelasan tentang temuan-temuan BPK yang dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018, baik yang sudah maupun

SIARAN PERS

Badan Pemeriksa Keuangan



yang belum ditindaklanjuti oleh entitas terperiksa. “Hasil penelaahan dan pembahasan yang dilakukan oleh DPD RI akan bahan untuk membuat pertimbangan dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara,” katanya

Provinsi Jateng sendiri merupakan salah satu dari tiga provinsi yang dikunjungi oleh Komite IV DPD RI dalam kunjungan kerja terkait Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester I BPK Tahun 2018 ini. Selain Jateng, Komite IV DPD RI juga melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Maluku. Provinsi Jateng dipilih sebagai salah satu provinsi yang dikunjungi karena tingkat opini BPK atas LK pemda-pemda di Jateng yang relatif meningkat setiap tahun anggaran.

Opini BPK atas laporan keuangan pemda-pemda di Jateng memang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun Anggaran 2015, dari 36 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Jateng, 21 LKPD memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 15 LKPD mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pada Tahun Anggaran 2016, terdapat peningkatan di mana dari 36 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Jateng, 31 LKPD memperoleh opini WTP dan 5 LKPD mendapat opini WDP. Sedangkan pada TA 2017, dari 36 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Jateng, 32 LKPD memperoleh opini WTP dan 4 LKPD mendapat opini WDP.

Saat membacakan pidato sambutan Gubernur Jateng, Asisten Bidang Administrasi Pemerintah Provinsi Jateng Budi Wibowo menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jateng mengapresiasi dipilihnya Jateng sebagai salah satu provinsi yang dikunjungi Komite IV DPD RI terkait Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester I BPK Tahun 2018. “Kunjungan kerja Komite IV ke Jateng menjadi kesempatan yang sangat bermanfaat bagi pemda-pemda di Jateng dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan daerah di wilayah Jateng,” katanya.

Merujuk dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester. Undang-Undang tersebut menyebut bahwa lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai kewenangannya. (*)

Informasi lebih lanjut:

Athur Saragi, Kepala Subbag Humas
Telp. (024) 8660826, Fax. (024) 8660884
Email: humas.jateng@bpk.go.id